

UPAYA PEMERINTAH PRANCIS DALAM MENDORONG KESETARAAN GENDER DI TINGKAT INTERNASIONAL PADA TAHUN 2019-2025

Nur Eka Marita¹, Carolina Irene Andalia²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional pada periode 2019–2025. Kesetaraan gender menjadi isu penting dalam hubungan internasional karena berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, keadilan sosial, dan pembentukan norma global. Penelitian ini menggunakan teori feminisme konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana norma kesetaraan gender dibentuk, disebarluaskan, dan diperkuat melalui kebijakan internasional Prancis. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa dokumen resmi pemerintah Prancis, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prancis mendorong kesetaraan gender melalui integrasi perspektif gender dalam bantuan pembangunan, penguatan diplomasi internasional yang berfokus pada hak perempuan, serta dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan seksual serta reproduksi. Selain itu, keterlibatan aktif Prancis dalam organisasi dan forum internasional memperkuat penyebaran norma kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda global. Dengan demikian, Prancis menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas penting dalam kebijakan internasionalnya.

Kata Kunci: feminisme konstruktivisme, kesetaraan gender, diplomasi internasional, norma global, Prancis.

Abstract

This study aims to analyze the efforts of the French government in promoting gender equality at the international level during the 2019–2025 period. Gender equality has become an important issue in international relations because it is closely related to the protection of women's rights, social justice, and the formation of global norms. This research employs constructivist feminism theory to explain how gender equality norms are formed, disseminated, and strengthened through France's international policies. The method used is descriptive research with a qualitative approach through a literature study, using official French government documents, reports from international organizations, scientific journals, and other relevant sources as data sources. The findings indicate that France promotes gender equality through the integration of gender perspectives into development assistance, the strengthening of international diplomacy focused on women's rights, and support for education and sexual and reproductive health. In addition, France's active involvement in international organizations and forums strengthens the dissemination of gender equality norms as part of the global agenda. Therefore, France positions gender equality as one of the important priorities in its international policy.

Keywords: *constructivist feminism, gender equality, international diplomacy, global norms, France.*

1. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah berkembang menjadi salah satu agenda penting dalam hubungan internasional karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik suatu negara, melainkan telah menjadi bagian dari kerja sama

internasional dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Menurut UNICEF, kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk mengembangkan potensi, berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berpusat pada manusia (UNICEF, 2017).

Meskipun demikian, ketimpangan gender masih menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Perempuan secara global masih memperoleh pendapatan sekitar 20% lebih rendah dibandingkan laki-laki, sementara sekitar 70% penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem merupakan perempuan (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2017). Selain itu, sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sehingga membatasi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih menjadi tantangan global yang memerlukan kerja sama antarnegara untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sering disebut *Sustainable Development Goals*, khususnya tujuan kelima mengenai kesetaraan gender (United Nations, n.d.).

Perkembangan tersebut mendorong berbagai negara untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan luar negeri sebagai bagian dari kontribusi terhadap penyebaran norma kesetaraan gender di tingkat internasional. Salah satu negara yang menunjukkan komitmen tersebut adalah Prancis. Sejak dekade 1970-an, Prancis secara bertahap membangun berbagai kebijakan dan instrumen hukum yang mendukung kesetaraan gender (European Parliament, 2015). Komitmen tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari kebijakan luar negeri melalui diplomasi internasional, kerja sama pembangunan, serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum multilateral (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, n.d.).

Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui *Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement* (CICID) pada tahun 2018 yang menetapkan kesetaraan gender sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri dan pembangunan internasional Prancis. Selanjutnya, sejak tahun 2019 Prancis secara resmi menerapkan *feminist diplomacy*, yaitu pendekatan kebijakan luar negeri yang

menempatkan perlindungan hak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari aktivitas diplomatik, baik dalam hubungan bilateral, multilateral, maupun kerja sama pembangunan (Ambassade de France en Suède, 2017; Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2024). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Prancis memandang kesetaraan gender tidak hanya sebagai nilai nasional, tetapi juga sebagai norma yang perlu diperkuat dalam tata kelola global.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan luar negeri feminis dengan fokus yang beragam, mulai dari implementasi kebijakan kesetaraan gender di tingkat domestik, bantuan luar negeri berbasis feminis, hingga tantangan penerapan *Feminist Foreign Policy* dalam sistem multilateral. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis upaya Pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional setelah penerapan *feminist diplomacy* pada periode 2019–2025 masih relatif terbatas. Padahal, periode tersebut menunjukkan semakin kuatnya komitmen Prancis dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam diplomasi internasional dan kerja sama pembangunan sebagai bagian dari agenda global.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai ‘bagaimana upaya Pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional pada periode 2019–2025?’. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya Pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri, diplomasi internasional, dan kerja sama pembangunan dengan menggunakan perspektif feminisme konstruktivisme untuk menjelaskan proses pembentukan dan penyebaran norma kesetaraan gender dalam hubungan internasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional pada periode 2019–2025. Analisis penelitian menggunakan perspektif feminisme konstruktivisme yang memandang bahwa perilaku negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan material, tetapi juga oleh proses interaksi sosial, pembentukan identitas, serta internalisasi norma yang berkembang dalam lingkungan internasional (Locher & Prügl, 2001).

Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma kesetaraan gender membentuk orientasi kebijakan luar negeri Prancis dan tercermin dalam berbagai upaya diplomasi internasionalnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi dokumen resmi Pemerintah Prancis, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, buku, dan sumber pustaka lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, interpretasi, dan penyusunan informasi secara sistematis untuk menjelaskan upaya Pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional.

3. UPAYA PEMERINTAH PRANCIS DALAM MENDORONG KESETARAAN GENDER DI TINGKAT INTERNASIONAL

Penguatan Budaya Institusional dan Kapasitas Internal Kementerian dalam Kesetaraan Gender

Pemerintah Prancis menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas nasional sejak Presiden Emmanuel Macron menetapkan isu tersebut sebagai *la grande cause nationale*. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan domestik, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri. Kementerian Eropa dan Luar Negeri kemudian membangun tata kelola yang lebih sistematis dengan memperkuat koordinasi antarunit, melakukan evaluasi berkala, serta memastikan setiap kebijakan diplomasi mempertimbangkan perspektif gender.

Pada saat yang sama, reformasi internal juga dilakukan melalui peningkatan representasi perempuan dalam posisi strategis, penyediaan mekanisme penanganan kekerasan di tempat kerja, penerapan kebijakan *teleworking*, hingga dukungan terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pegawai. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender dimulai dari transformasi budaya organisasi sebelum dipromosikan ke tingkat internasional (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2018).

Penguatan tersebut juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pegawai baru, diplomat, hingga pejabat yang menangani kerja sama internasional memperoleh pelatihan mengenai analisis gender dan penerapan perspektif gender dalam penyusunan program. Selain itu, kementerian membentuk jaringan *gender focal points* dan koresponden di berbagai perwakilan diplomatik untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta pemantauan implementasi kebijakan di berbagai negara (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2018).

Dalam perspektif feminis konstruktivisme, upaya ini menunjukkan bahwa norma kesetaraan gender tidak hadir secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses institusional yang membentuk identitas, cara berpikir, dan praktik para aktor negara. Dengan demikian, transformasi internal kementerian menjadi fondasi penting bagi Prancis dalam menjalankan diplomasi yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender di tingkat internasional

Integrasi Isu Kesetaraan Gender dalam Diplomasi dan Advokasi Politik Internasional

Pemerintah Prancis mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam praktik diplomasi dengan menempatkannya sebagai bagian dari berbagai agenda pembangunan dan kerja sama internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa isu gender tidak dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai unsur penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas global. Karena itu, perspektif gender dihubungkan dengan berbagai komitmen internasional, seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *European Union Gender Action Plan*, hingga implementasi *Paris Agreement*. Melalui pendekatan tersebut, Prancis berupaya memastikan bahwa setiap kerja sama internasional turut mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara setara (Hunt, 2025).

Dalam diplomasi bilateral, komitmen tersebut diwujudkan melalui peran aktif kedutaan besar dan konsulat Prancis di berbagai negara. Para duta besar didorong untuk menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik negara mitra sehingga promosi kesetaraan gender dapat dilakukan secara lebih relevan. Isu pemberdayaan perempuan kemudian diintegrasikan ke dalam dialog politik, kerja sama pembangunan, kegiatan budaya, forum akademik, hingga proses negosiasi internasional. Selain itu, pemerintah Prancis juga memperkuat kolaborasi dengan *Agence Française de Développement (AFD)*, delegasi Uni Eropa, pemerintah negara mitra, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa advokasi kesetaraan gender tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi juga didukung oleh berbagai aktor internasional (Centre for Feminist Foreign Policy, 2021).

Selain melalui hubungan bilateral, Prancis juga memperkuat pengaruhnya melalui forum multilateral sebagai sarana membangun norma internasional mengenai

kesetaraan gender. Dalam berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G7, G20, dan *Council of Europe*, Prancis secara konsisten mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari kebijakan lintas sektor. Fokus yang diangkat meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan profesional, kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (*STEM*). Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dipandang sebagai prasyarat penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Lea, 2025).

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan terhadap berbagai organisasi dan instrumen internasional. Prancis mendorong integrasi perspektif gender dalam program *World Bank*, *World Health Organization* (WHO), *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *International Labour Organization* (ILO). Selain itu, Prancis berperan aktif dalam *Organisation internationale de la Francophonie* untuk memperkuat strategi pemberdayaan perempuan, mendukung penerapan prinsip paritas dalam kepemimpinan organisasi internasional, serta memperkuat implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Commission on the Status of Women* (CSW), dan *UN Security Council Resolution 1325* mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Dukungan terhadap berbagai mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi Prancis tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga pada penguatan norma global mengenai kesetaraan gender (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2025).

Dalam perspektif feminis konstruktivisme, diplomasi Prancis menunjukkan bahwa norma kesetaraan gender dibentuk dan diperkuat melalui interaksi antarnegara dan institusi internasional. Melalui diplomasi bilateral maupun forum multilateral, Prancis berupaya menginternalisasikan kesetaraan gender sebagai norma yang semakin diterima dalam ranah internasional.

Dukungan Pendanaan Internasional untuk Program Kesetaraan Gender

Pemerintah Prancis memandang pendanaan pembangunan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kesetaraan gender di tingkat internasional. Melalui kebijakan luar negeri feminis, bantuan pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperluas perlindungan

hak-hak perempuan dan mengurangi ketimpangan gender di negara mitra. Komitmen tersebut diwujudkan melalui *Aide Publique au Développement* (APD), yaitu bantuan pembangunan resmi yang disalurkan melalui kerja sama bilateral, Uni Eropa, maupun organisasi internasional. Dalam kerja sama bilateral, pendanaan diberikan dalam bentuk proyek pembangunan, bantuan anggaran sektoral, pinjaman lunak, kerja sama teknis, hingga penghapusan utang, dengan Agence Française de Développement (AFD) sebagai lembaga utama pelaksana kebijakan tersebut. Sementara itu, melalui Uni Eropa, Prancis turut berkontribusi pada *European Development Fund* (EDF) yang mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pengurangan ketimpangan gender di negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (Agence Française de Développement, n.d.).

Untuk memastikan bahwa bantuan pembangunan benar-benar mendorong kesetaraan gender, pemerintah Prancis menetapkan target yang terukur dalam implementasi APD. Melalui strategi yang dikembangkan Kementerian Eropa dan Luar Negeri, proporsi APD bilateral yang memiliki tujuan utama atau signifikan terhadap kesetaraan gender ditingkatkan dengan mengacu pada sistem OECD DAC Gender Marker kategori 1 dan 2. Target tersebut diperkuat melalui penyesuaian *Contrats d'Objectifs et de Moyens* (COM) sehingga sedikitnya 50% proyek yang dibiayai AFD memiliki penanda gender. Selain itu, pemerintah menargetkan pembiayaan sekitar 700 juta euro per tahun bagi program yang secara khusus berfokus pada pengurangan ketimpangan gender serta menerapkan sistem *marquage genre* sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek agar dampak setiap program dapat dipantau secara sistematis (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2022).

Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui APD, tetapi juga melalui peningkatan kontribusi terhadap berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Prancis meningkatkan dukungan bagi UN Women, UNFPA, *Fonds français Muskoka*, serta *Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria* dengan memastikan bahwa perspektif gender menjadi bagian dari proses pendanaan dan evaluasi program. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui *Programming Act of 4 August 2021* yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 75% komitmen APD bilateral harus memiliki tujuan utama atau signifikan terhadap kesetaraan gender, dengan 20% di antaranya menjadikan

kesetaraan gender sebagai tujuan utama. Selain itu, Prancis juga mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif seperti *co-financing*, *concessional loans*, *microfinance*, *gender bonds*, serta *development impact bonds* untuk memperluas dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan (Gouvernement de la République Française, 2021).

Dukungan finansial tersebut semakin diperkuat melalui pembentukan Support Fund for Feminist Organizations (FSOF) yang diluncurkan pada masa Presidensi G7 Prancis. Dana ini bertujuan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil feminis di berbagai negara, termasuk wilayah yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Dengan pendanaan yang terus meningkat hingga sekitar 250 juta euro pada periode 2020–2024, FSOF telah mendukung lebih dari 1.400 organisasi feminis di 75 negara. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Prancis terhadap kesetaraan gender tidak berhenti pada diplomasi politik, tetapi juga diwujudkan melalui mobilisasi sumber daya finansial yang mendukung perubahan di tingkat lokal maupun global (Agence Française de Développement, n.d.).

Dalam perspektif feminis konstruktivisme, kebijakan pendanaan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran norma kesetaraan gender tidak hanya dilakukan melalui diplomasi dan deklarasi politik, tetapi juga melalui instrumen pembangunan yang membentuk praktik serta standar kerja sama internasional. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam mekanisme pendanaan, Prancis berupaya memperkuat penerimaan norma kesetaraan gender sebagai bagian dari tata kelola pembangunan global.

Memperluas Akses Pendidikan Perempuan di Tingkat Internasional

Pemerintah Prancis menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan sistem pendidikan, serta pengembangan kapasitas institusi pendidikan di berbagai negara mitra. Program pelatihan bagi guru disusun secara berkelanjutan, baik sebelum maupun selama masa tugas, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat tata kelola pendidikan dan profesionalisme tenaga pendidik. Pendekatan tersebut dirancang agar lembaga pendidikan di negara mitra mampu

mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (Global Partnership for Education, 2025).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program kerja sama internasional. Di Haiti, program AVNI NOU berfokus pada peningkatan kompetensi guru sekaligus memperkuat posisi profesional mereka dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, di Senegal, kerja sama antara R-INSPÉ dan Kementerian Pendidikan Prancis menghubungkan pusat-pusat pelatihan guru dengan lembaga pendidikan di Prancis melalui pengembangan penelitian, transfer keahlian, dan penguatan kapasitas administrasi pendidikan. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia sekaligus reformasi kelembagaan di negara mitra (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2024).

Selain peningkatan kapasitas guru, Prancis memanfaatkan bahasa Prancis sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan dan peluang ekonomi di kawasan Francophone. Melalui pengembangan pendidikan bilingual dan multilingual, peserta didik didorong menggunakan bahasa ibu pada tahap awal pembelajaran sebelum secara bertahap menguasai bahasa Prancis. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keberhasilan akademik tanpa mengabaikan identitas budaya lokal. Implementasinya didukung melalui kerja sama dengan *Organisation internationale de la Francophonie* (OIF), CONFEMEN, IFEF, dan AUF, yang berfokus pada pelatihan guru, reformasi kurikulum, pengembangan sumber belajar, serta peningkatan kualitas evaluasi pendidikan (Organisation internationale de la Francophonie, n.d.).

Strategi tersebut diperkuat melalui berbagai program pendidikan berskala internasional, seperti ELAN, APPRENDRE, Educational Resources Project, dan IFClasse, yang mendukung peningkatan kompetensi guru, pengembangan pembelajaran bilingual, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Selain itu, Prancis juga mengembangkan *Label France Education*, pusat *Cité Internationale de la Langue Française*, serta strategi *Choose France/Bienvenue en France* untuk meningkatkan mobilitas akademik internasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah mahasiswa internasional, memperluas pemberian beasiswa, memperkuat layanan pendidikan tinggi, serta mendukung peneliti dan mahasiswa dari negara yang terdampak konflik melalui program PAUSE. Di Afrika,

program *Partnerships with African Higher Education* (PEA) memperkuat kolaborasi perguruan tinggi, sedangkan *Programme de bourses Élysée* memberikan kesempatan bagi mahasiswa Suriah untuk menempuh pendidikan tinggi di Prancis. (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2024).

Dalam perspektif feminis konstruktivisme, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang yang membentuk norma, identitas, dan relasi sosial mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Berbagai program pendidikan yang dikembangkan Prancis menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan dapat menjadi mekanisme untuk mengubah konstruksi sosial mengenai perempuan sebagai aktor yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan publik. Dengan demikian, perluasan akses pendidikan menjadi bagian dari proses pembentukan norma kesetaraan gender yang diperkuat melalui kerja sama internasional dan praktik kelembagaan secara berkelanjutan.

Mendorong Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Tingkat Internasional

Pemerintah Prancis menjadikan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri feminisnya melalui kerja sama pembangunan, kemitraan multilateral, dan penguatan sistem kesehatan di berbagai negara mitra. Upaya ini diarahkan untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan bayi, memperkuat *family planning*, serta menyediakan informasi kesehatan yang komprehensif agar perempuan dapat memperoleh hak kesehatan secara aman dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi dipandang sebagai hasil dari kebijakan dan kerja sama internasional yang dibangun secara kolektif, bukan sekadar persoalan layanan kesehatan semata (Ministère de la Santé et de la Prévention, 2023).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Prancis mendukung berbagai program pembangunan kesehatan, seperti penguatan layanan obstetri dan neonatal di Chad serta *Ouagadougou Partnership* yang sejak 2011 memperkuat akses kontrasepsi modern di sembilan negara Afrika Barat berbahasa Prancis. Selain meningkatkan layanan *family planning*, kemitraan ini juga mendorong penyediaan fasilitas kesehatan

menstruasi, sanitasi yang layak, dan informasi kesehatan reproduksi bagi perempuan. Berbagai langkah tersebut bertujuan memperkuat kualitas layanan kesehatan sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan kegiatan ekonomi (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2023).

Prancis juga mendorong perubahan norma sosial melalui pendekatan *Social and Behaviour Change* dengan memperluas pelaksanaan *Comprehensive Sexuality Education* (CSE), program *Our Rights, Our Lives, Our Future* (O3), serta program edutainment *C'est la vie!* yang menjangkau masyarakat melalui televisi, radio, dan media digital. Program-program tersebut membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, hak tubuh, pencegahan kekerasan, serta pentingnya keterlibatan laki-laki dalam mendukung kesehatan reproduksi perempuan sehingga tercipta perubahan perilaku yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2023).

Selain memperluas akses layanan kesehatan, Prancis juga memperkuat perlindungan hak reproduksi perempuan melalui dukungan terhadap layanan aborsi yang aman, *Le Centre ODAS*, *Generation Equality Forum*, serta berbagai program pencegahan kekerasan berbasis gender. Komitmen tersebut diwujudkan melalui promosi *Istanbul Convention*, dukungan terhadap *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation*, proyek *Nengo* bagi penyintas kekerasan seksual di Republik Afrika Tengah, serta skema *FISONG* yang mendorong inovasi pelayanan kesehatan reproduksi di Afrika Barat. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2025).

Dalam perspektif feminis konstruktivisme, berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan norma yang dibentuk dan diperkuat melalui kerja sama internasional, kebijakan, dan praktik institusional. Melalui diplomasi, kerja sama multilateral, dan advokasi kebijakan, Prancis berupaya mendorong negara-negara lain dan komunitas internasional menerima kesetaraan gender sebagai bagian dari norma dalam hubungan internasional.

Efektivitas Upaya Pemerintah Prancis dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Tingkat Internasional

Berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan, kebijakan pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional selama periode 2019–2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup signifikan. Efektivitas tersebut tercermin dari keberhasilan Prancis dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai instrumen kebijakan luar negeri, kerja sama pembangunan, pendanaan internasional, serta program pemberdayaan perempuan yang menjangkau berbagai kawasan dunia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender tidak hanya diwujudkan melalui diplomasi normatif, tetapi juga melalui implementasi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Melalui dukungan yang disalurkan oleh *Agence Française de Développement* (AFD) dan *Support Fund for Feminist Organizations* (FSOF), Prancis tidak hanya memperkuat komitmen normatif terhadap kesetaraan gender, tetapi juga mendorong pelaksanaan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan dan anak perempuan di berbagai negara. Pada tahun 2025, sekitar 68,5% investasi AFD telah berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan gender dan pemberdayaan perempuan, sementara FSOF sejak tahun 2020 telah mendukung lebih dari 1.400 organisasi feminis yang tersebar di 75 negara (Agence Française de Développement, 2025).

Efektivitas tersebut juga tercermin dari berbagai program yang berhasil memperkuat kapasitas organisasi perempuan, meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta memperluas kesempatan pemberdayaan ekonomi di berbagai negara mitra. Berbagai inisiatif yang didukung Prancis turut memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil, meningkatkan akses perempuan terhadap berbagai layanan publik, serta memperluas perlindungan bagi perempuan yang berada di wilayah konflik maupun krisis kemanusiaan (Agence Française de Développement, 2025).

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah Prancis tidak berhenti pada tataran komitmen politik dan diplomasi normatif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang berkontribusi terhadap penguatan kesetaraan gender di tingkat internasional. Dengan demikian, efektivitas kebijakan luar negeri

feminis Prancis tercermin melalui kemampuan negara tersebut dalam menghubungkan komitmen normatif dengan implementasi program yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan di berbagai belahan dunia.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Prancis dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional pada periode 2019–2025 merupakan respons terhadap masih adanya ketimpangan gender global melalui penerapan kebijakan luar negeri feminis. Berdasarkan perspektif feminis konstruktivisme, kesetaraan gender dipahami sebagai norma yang dibentuk melalui proses sosial, politik, dan kelembagaan, sehingga kebijakan luar negeri menjadi instrumen penting untuk memperkuat norma tersebut dalam hubungan internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Prancis mengimplementasikan lima upaya utama, yaitu memperkuat budaya institusional dan kapasitas internal kementerian, mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam diplomasi bilateral dan multilateral, meningkatkan pendanaan pembangunan yang berperspektif gender, memperluas akses pendidikan bagi perempuan, serta memperkuat pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Berbagai upaya tersebut saling melengkapi dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam kerja sama dan kebijakan internasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya integrasi perspektif gender dalam pembangunan internasional, bertambahnya dukungan terhadap organisasi perempuan dan masyarakat sipil, serta berkembangnya berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan hak perempuan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan luar negeri feminis telah menjadi instrumen penting bagi Prancis untuk memperkuat penyebaran norma kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia di tingkat internasional.

REFERENSI

Agence Française de Développement. (2025). *Feminist foreign policy: What tangible progress has been made on the ground?* AFD.

<https://www.afd.fr/en/news/feminist-foreign-policy-what-tangible-progress-has-been-made-ground>

Agence Française de Développement. (n.d.). *Fonds de soutien aux organisations féministes : Réduire les inégalités de genre en renforçant les organisations féministes*. <https://www.afd.fr/fr/fonds-de-soutien-aux-organisations-feministes-reduire-les-inegalites-de-genre-en-renforçant-les>

Agence Française de Développement. (n.d.). *L'aide publique au développement (APD)*. <https://www.afd.fr/fr/laide-publique-au-developpement-apd>

Ambassade de France en Suède. (2017). « *Serment de Paris* » en faveur des droits des femmes (8 mars 2017). <https://se.ambafrance.org/Serment-de-Paris-en-faveur-des-droits-des-femmes-8-mars-2017>

Centre for Feminist Foreign Policy. (2021). *Feminist foreign policy in practice: Comparative analysis of global frameworks*. <https://centreforfeministforeignpolicy.org/>

European Parliament. (2015). *The policy on gender equality in France (Study for the FEMM Committee)*. Directorate-General for Internal Policies. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510024/IPOL_IDA\(2015\)510024_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510024/IPOL_IDA(2015)510024_EN.pdf)

Global Partnership for Education. (2025). *How GPE donors are prioritizing gender equality in education*. GPE Secretariat. <https://www.globalpartnership.org/blog/how-gpe-donors-are-prioritizing-gender-equality-education>

Gouvernement de la République Française. (2021). *Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales*. Légifrance. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898536>

Hunt, M. (2025). *France launches international strategy for feminist foreign policy*. Global Government Forum. <https://www.globalgovernmentforum.com/france-launches-international-strategy-for-feminist-foreign-policy/>

Lea, J. (2025). *Gender equality*. Expertise France. <https://www.expertisefrance.fr/sites/expertise/files/2025-12/exp-plaquette-thematique-genre-a4-uk-pdf-basse-def.pdf>

Locher, B., & Prügl, E. (2001). Feminism and constructivism: Worlds apart or sharing the middle ground? *International Studies Quarterly*, 45(1), 111–129. <http://www.jstor.org/stable/3096103>

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2017). *France's international strategy for gender equality (2018–2022)*. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/meae_strategie_-_en_cle076525.pdf

- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2018). *France's international strategy on gender equality (2018–2022)*. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/meae_strategie_-_en_cle076525.pdf
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2022). *France's international strategy on gender equality (2023–2027)*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/>
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2023). *France's international strategy for sexual and reproductive health and rights (2023–2027)*.
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2024). *France's international strategy on basic education (2024–2028)*. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/france_s_international_strategy_on_basic_education_for_2024-2028_cle873642.pdf
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2025). *L'action de la France pour les droits et santé sexuels et reproductifs*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-en-action/agir-pour-la-paix-et-le-respect-des-droits-de-l-homme/promouvoir-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-monde/l-action-de-la-france-pour-les-droits-et-sante-sexuels-et-reproductifs>
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2025). *France's international strategy for a feminist foreign policy (2025–2030)*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/feminist-diplomacy/france-s-international-strategy-for-a-feminist-foreign-policy-2025-2030>
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (n.d.). *Gender equality: A priority for France*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/women-s-rights/gender-equality-a-priority-for-france/>
- Ministère de la Santé et de la Prévention. (2023). *France's global health strategy 2023–2027: Partnerships, solidarity, and gender equality in public health*.
- Organisation internationale de la Francophonie. (n.d.). *La langue française dans le monde*. <https://www.francophonie.org/la-langue-francaise-dans-le-monde-305>
- UNICEF. (2017). *Gender equality: Glossary of terms and concepts*. <https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Genderglossarytermsandconcepts.pdf>
- United Nations. (n.d.). *Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*. United Nations Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals/goal5>
- World Bank. (2019). *Gender-based violence (violence against women and girls)*. <https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls>